

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA  
PENGUNA ANGGARAN BA.018  
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2018  
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI  
018.11.1000. 109019.DK**

Untuk Periode Yang Berakhir  
31 Desember 2018



Alamat Kantor:  
Jl. Samarinda Kota Baru Jambi

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN BA.018  
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2018**

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi  
Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2018

Jl. Samarinda Kota Baru, Jambi

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jambi, 31 Desember 2018  
Kepala Dinas,

Ir.H. Amir Hasbi,ME  
NIP. 196404061993031006

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	2
II. Neraca	3
III. Laporan Operasional	4
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	5
V. Catatan atas Laporan Keuangan	6
A Penjelasan Umum	
A.1 Profil dan kebijakan Teknis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	6
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	6
A.3 Basis Akuntansi	7
A.4 Dasar Pengukuran	7
A.5 Kebijakan Akuntansi	7
B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	13
B.1 Belanja	13
B.2 Belanja Barang	13
C Penjelasan atas Pos-pos Neraca	15
C.2 Aset Tetap	15
C.4 Ekuitas	16
D Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	18
D.1 Beban Persediaan	16
D.2 Beban Barang dan Jasa	16
D.3 Beban Perjalanan Dinas	17
D.4 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	18
D.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi	18
D.6 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	19
E Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	19
E.1 Ekuitas Awal	19
E.2 Surplus/Defisit-LO	20
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	20

E.4	Penyesuaian Nilai Aset	20
E.5	Transaksi Antar Entitas	20
E.6	Ekuitas Akhir	20
F	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	20
F.1	Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	20
F.2	Pengungkapan Lain-lain	20

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, 31 Desember 2018  
Kepala Dinas,

Ir. H. Amir Hasbi,ME  
NIP. 196404061993031006

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp4.824.567.735,00 atau mencapai 99,48% dari alokasi anggaran sebesar Rp4.850.000.000,00

### II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp54.232.221,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 54.232.221,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas Rp. 54.232.221,00.

### III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.4.861.286.549,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-.4.861.286.549,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp564.000,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-.4.860.722.549,00,00.

### IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp90.387.035,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-.4.860.722.549,00,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.824.567.735,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp54.232.221,00.

## V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

### I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

#### DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31Desember 2018 dan 31Desember 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2018			31Desember 2017
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>					
Jumlah Pendapatan		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BELANJA</b>	B.2				
<b>Belanja Operasi</b>					
Belanja Barang	B.2.1	4.850.000.000,00	4.824.567.735,00	99,48	3.502.737.163,00
Jumlah Belanja Operasi		4.850.000.000,00	4.824.567.735,00	99,48	3.502.737.163,00
<b>Belanja Modal</b>					
Jumlah Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja		4.850.000.000,00	4.824.567.735,00	99,48	3.502.737.163,00

Jambi, 31Desember 2018

Kepala Dinas,

Ir.H.Amir Hasbi, ME

NIP. 196404061993031006



## II. NERACA

### DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI NERACA PER 31Desember 2018 dan 31Desember 2017

Uraian	Catatan	31Desember 2018	31Desember 2017
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0,00	0,00
Persediaan	C.1.2	0,00	0,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Peralatan dan Mesin	C.2.1	548.351.750,00	548.351.750,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.2	-494.119.529,00	-457.964.715,00
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>54.232.221,00</b>	<b>90.387.035,00</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>54.232.221,00</b>	<b>90.387.035,00</b>
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.4.1	0,00	0,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ekuitas</b>			
Ekuitas	C.5.1	54.232.221,00	90.387.035,00
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>54.232.221,00</b>	<b>90.387.035,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>54.232.221,00</b>	<b>90.387.035,00</b>

Jambi, 31Desember 2018  
Kepala Dinas,

Ir.H. Amir Hasbi, ME  
NIP. 196404061993031006

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31Desember 2018 dan 31Desember 2017**

Uraian	Catatan	31Desember 2018	31Desember 2017
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>BEBAN</b>			
Beban Persediaan	D.1	52.563.000,00	47.616.531,00
Beban Barang dan Jasa	D.2	1.282.280.000,00	1.023.726.500,00
Beban Pemeliharaan	D.3	0,00	7.030.000,00
Beban Perjalanan Dinas	D.4	1.000.288.735,00	1.134.409.727,00
Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat	D.5	2.490.000.000,00	1.289.892.725,00
Beban Bantuan Sosial	D.6	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	36.154.814,00	36.154.814,00
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>4.861.286.549,00</b>	<b>3.538.830.297,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>-4.861.286.549,00</b>	<b>-3.538.830.297,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>564.000,00</b>	<b>-61.680,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>-4.860.722.549,00</b>	<b>-3.538.830.297,00</b>

Jambi, 31Desember 2018  
Kepala Dinas,

Ir. H. Amir Hasbi,ME  
NIP. 196404061993031006

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31Desember 2018 dan 31Desember 2017**

Uraian	Catatan	31Desember 2018	31Desember 2017
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	90.387.035,00	126.541.849,00
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2	-4.860.722.549,00	-3.538.891.977,00
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR</b>	E.3	0,00	0,00
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	E.4		
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	0,00	0,00
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.5	4.824.567.735,00	3.502.737.163,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>		<b>54.232.221,00</b>	<b>90.387.035,00</b>

Jambi, 31Desember 2018  
Kepala Dinas,

Ir.H. Amir Hasbi,ME  
NIP. 196404061993031006

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Gubernur Jambi merupakan instansi yang dibentuk bertujuan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Jambi.

Untuk mewujudkan tujuan diatas, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi berkomitmen dengan visi “ Menjadi Institusi yang Prima dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Menuju Masyarakat yang Sejahtera”.

Upaya mewujudkan visi tersebut dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

- Meningkatkan kemampuan aparat dan peran serta lembaga masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan.
- Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan.
- Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan pengembangan ketahanan pangan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

#### A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### A.3. Basis Akuntansi

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

**(1) Pendapatan - LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(2) Pendapatan - LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.



- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

### (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**(8) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

## B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2018 adalah sebesar Rp4.824.567.735,00 atau 99,48% dari anggaran belanja sebesar Rp4.850.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018

Uraian	2018		
Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Barang	4.850.000.000,00	4.824.567.735,00	99,48
<b>Total Belanja Kotor</b>	4.850.000.000,00	4.824.567.735,00	99,48
Pengembalian Belanja		0,00	0.00
<b>Total Belanja</b>	4.850.000.000,00	4.824.567.735,00	99,48

Dibandingkan dengan Tahun 2017, Realisasi Belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,99% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan realisasi .

Perbandingan Realisasi Belanja 31Desember 2018 dan 31Desember 2017

Uraian	Realisasi 31Desember 2018	Realisasi 31Desember 2017	.%
Belanja Barang	4.850.000.000,00	3.502.737.163,00	27,77
Belanja Sosial	0,00	0,00	0,00
<b>Total Belanja</b>	4.850.000.000,00	3.502.737.163,00	27,77

#### B.2.1 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31Desember 2018 dan 31Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 4.850.000.000,00 dan Rp3.502.737.163,00. Realisasi belanja barang TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 27,77% dari TA 2017. Hal ini disebabkan adanya penambahan pagu sehingga realisasi anggaran pun bertambah.

Perbandingan Belanja Barang  
per 31Desember 2018 dan 31Desember 2017

Uraian	Realisasi 31Desember 2018	Realisasi 31Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	0,00	0,00	0,00
Belanja Honor Operasional Satker	147.240.000,00	135.400.000,00	8,04
Belanja Bahan	260.059.000,00	258.857.000,00	0,46
Belanja Honor Output Kegiatan	485.560.000,00	479.540.000,00	1,24
Belanja Barang Non Operasional	282.721.000,00	42.979.500,00	84,8
Belanja Barang Persediaan	51.999.000,00	47.708.211,00	8,25
Belanja Jasa	105.200.000,00	72.200.000,00	31,36
Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.000.288.735,00	1.134.409.727,00	-13,41
Belanja Sewa	1.500.000,00	34.750.000,00	-95,68
Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda	0,00	12.500.000,00	-100
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	2.490.000.000,00	1.320.000.000,00	46,98
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>4.824.567.735,00</b>	<b>3.545.344.438,00</b>	<b>26,51</b>
Pengembalian Belanja Barang	<b>0,00</b>	<b>42.607.275</b>	<b>-100</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.824.567.753,00</b>	<b>3.502.737.163,00</b>	<b>27,39</b>

## C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.2 ASET TETAP

#### C.2.1 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.548.351.750,00 dan Rp 548.351.750,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	<b>548.351.750,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Transfer Masuk	<b>0,00</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>548.351.750,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	<b>-494.119.529,00</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>	<b>54.232.221,00</b>

#### C.2.2 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-494.119.529,00 dan Rp-457.964.715,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

##### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	<b>Peralatan dan Mesin</b>	548.351.750,00	<b>-494.119.529,00</b>	54.232.221,00
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>548.351.750,00</b>	<b>-494.119.529,00</b>	54.232.221,00

## C.4 EKUITAS

### C.4.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp54.232.221,00 dan Rp90.387.035,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 52.563.000,00 dan Rp 47.616.531,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan baku	239.000,00	0,00	100,00
Beban Persediaan konsumsi	52.324.000,00	47.616.531,00	8,99
<b>Jumlah</b>	<b>52.563.000,00</b>	<b>47.616.531,00</b>	<b>9,41</b>

Beban persediaan konsumsi sebesar Rp.52.563.000,00 merupakan belanja alat tulis kantor dan bahan cetakan yang digunakan pada tahun 2018.

### D.2 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.282.280.000,00 dan Rp.1.023.726.500,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Bahan	260.059.000,00	258.857.000,00	0,46
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	147.240.000	135.400.000,00	8,04
Beban Honor Output Kegiatan	485.560.000,00	479.540.000,00	1,24
Beban Jasa Profesi	105.200.000,00	72.200.000,00	31,36
Beban Sewa	1.500.000,00	34.750.000,00	95,68
BebanBarang Non Operasionallainya	282.721.000,00	0,00	100
<b>Jumlah</b>	<b>1.282.280.000,00</b>	<b>980.747.000,00</b>	<b>23,52</b>

Beban bahan sebesar Rp.260.059.000,00 merupakan belanja barang untuk keperluan pelatihan, sosialisasi workshop dan pertemuan dalam bentuk perlengkapan dan konsumsi. Beban operasional satuan kerja sebesar Rp. 147.240.000,00 merupakan honor pengelola anggaran. Beban honor output kegiatan sebesar Rp. 485.560.000,00 merupakan honor kegiatan dan panitia pertemuan. Beban jasa profesi sebesar Rp. 105.200.000,00 merupakan honor yang dibayarkan kepada narasumber dan moderator kegiatan pertemuan, workshop, sosialisasi dan apresiasi. Beban sewa sebesar Rp. 1.500.000,00 digunakan untuk membiayai sewa ruang pertemuan kegiatan sosialisasi dan workshop .Bebanbarang non operasionallainnyasebesarRp.

282.721.000,00digunakanuntukPengadaanalattesujiLaboratoriumkegiatanKeamanan Pangan

#### D.4 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 1.000.288.735,00 dan Rp1.134.409.727,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas  
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	487.671.500,00	587.203.781,00	-20,40
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	101.450.000,00	185.600.000,00	-82,94

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	231.087.810	179.696.800,00	22,23
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	180.079.425	181.909.146,00	1,02
<b>Jumlah</b>	<b>1.000.288.735</b>	<b>1.134.409.727,00</b>	<b>-13,41</b>

Beban perjalanan biasa sebesar Rp. 487.671.500,00 digunakan untuk membiayai perjalanan dalam rangka konsultasi, koordinasi ke pusat dan pembinaan ke kabupaten/kota hingga kelompok sasaran. Beban perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp. 101.450.000,00 merupakan biaya perjalanan dinas aparat kabupaten dalam melakukan identifikasi, pembinaan dan evaluasi ke kelompok sasaran penerima manfaat. Beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebesar Rp. 231.087.810,00 merupakan belanja pertemuan di provinsi dalam rangka sosialisasi, apresiasi dan evaluasi. Beban perjalanan dinas paket meeting luar kota sebesar Rp. 180.079.425,00 digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka mengikuti agenda nasional.

#### D.5 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.332.500.000,00 dan Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	2.490.000.000,00	1.332.500.000,00	46,48
<b>Jumlah</b>	<b>2.490.000.000,00</b>	<b>1.332.500.000,00</b>	<b>46,48</b>

Beban barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2018 Rp.2.490.000.000,00 dibandingkan pada tahun 2017 Rp.1.332.500.000,00 mengalami kenaikan sebesar 46,48%.

#### D.6 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar



Rp36.154.814,00 dan Rp 36.154.814,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31Desember 2018 dan 31Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 31Desember 2018 dan 31Desember 2017

Uraian	31Desember 2018	31Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	36.154.814,00	36.154.814,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>36.154.814,00</b>	<b>36.154.814,00</b>	<b>0,00</b>

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (36.154.814,00) pada semester II tahun 2018 adalah Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Aset-aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dan Aset lain berupa Barang Milik Negara yang berupa transfer masuk dari satker In Aktif pada tahun 2016.

#### D.7 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional  
per 31Desember 2017 dan 31Desember 2016

Uraian	31Desember 2017	31Desember 2016	% Naik / Turun
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya	-61.680,00	-604.600,00	-89,80
<b>Jumlah</b>	<b>-61.680,00</b>	<b>-604.600,00</b>	<b>-89,80</b>

Beban dari kegiatan Non Operasional lainnya pada tahun 2017 adalah Rp.- 61.680,00 sedangkan pada tahun 2016 beban penyesuaian nilai persediaan adalah Rp.-604.600,00

## E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31Desember 2017 dan 31Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp126.541.849,00 dan Rp 162.696.658,00.

## E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31Desember 2017 dan 31Desember 2016 adalah sebesar Rp-3.538.891.977 dan Rp -6.058.141.408,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

## E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31Desember 2017 dan 31Desember 2016.

### E.4.1 PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31Desember 2017 dan 31Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

## E.5 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31Desember 2017 dan 31Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 3.502.737.163,00 dan Rp 6.021.986.595,00. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31Desember 2017.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.502.737.163,00
Transfer Masuk	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>776.584.000,00</b>

## E.6 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31Desember 2017 dan 31Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 90.387.035 dan Rp 126.541.849,00.

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

-

### F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN